



Diterbitkan oleh Perkumpulan Hukum Hak Asasi Manusia dan Keadilan (Perkumpulan HAK) untuk anggota.  
Penanggungjawab: Ketua Badan Eksekutif  
Pengelola: Divisi Pelayanan Anggota  
Alamat Redaksi: Rua Governador C.M. Serpa Rosa  
T-091, Farol, Dili, Timor Leste tel. 313 323  
fax. 313 324 email: [direito@yayasanhak.minihub.org](mailto:direito@yayasanhak.minihub.org)

No. 8 (Januari-Juni 2005)

# Newsletter HAK

## Informasi Aktivitas Enam Bulan Kepada Anggota



*Training polisi di Liquica. Dok HAK*

gram Penegakan Keadilan, Sdr. Rui Manuel Viana dan Julino da Silva Ximenes sebagai PM dan Assisten Program Advokasi Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (Ekososbud), dan Sdri. Nelia Soares Gusmao dan Vitor Lopes sebagai Office Manager dan Assisten Office Manager.

Selanjutnya, para pengurus program baru ini menjalani pelatihan selama dua minggu tentang kepemimpinan, manajemen, dan administrasi program baru. Pelatihan ini difasilitasi oleh Direktur dan Wakil Direktur. Dan sambil mempersiapkan pelaksanaan program, terdapat sebuah Tim yang dipimpin Sdr. Oscar da Silva yang mengurus penutupan ketiga Rumah Rakyat (kantor cabang) yang termasuk penarikan asset lembaga yang ada di ketiga kantor cabang tersebut. Proses peralihan ini berlangsung hingga bulan Februari 2005.

### **USAID mendanai operasional HAK selama 2 bulan**

Untuk memastikan proses peralihan manajemen program lama ke baru, tidak menghentikan sama sekali pelayanan HAK ke masyarakat, maka USAID membantu dana operasional kantor selama 2 bulan yaitu bulan Januari dan Februari 2005. Dana sejumlah U\$ 19.953 ditujukan untuk membiayai gaji semua staf dan biaya kantor yaitu sewa kantor, listrik, telepon/internet, alat tulis kantor.

### **Implementasi Program Strategis baru 2005-2007**

**A**wal tahun 2005 ini kantor HAK disibukan dengan proses peralihan manajemen dan mekanisme kerja sesuai Program Strategis yang baru disahkan melalui Rapat Anggota Tahunan pada akhir bulan Desember lalu.

Program Strategis untuk periode 2005 – 2007 mencakup 3 program advokasi dan 1 program penguatan institusi. Adapun ke-3 program advokasi adalah: 1) Program Penegakan Hukum, 2) Program Penegakan Keadilan dan 3) Program Advokasi Hak Ekososbud. Manajemen terhadap masing-masing program ini akan ditangani oleh seorang Program Manager (PM) dengan dibantu seorang Assisten.

Sesuai dengan kesepakatan pada Rapat Anggota Tahunan lalu bahwa PM harus diberi wewenang yang lebih luas untuk menangani masing-mas-

ing program. Bahwa kesepakatan ini juga sebagai strategi untuk mengkaderisasi manager level dua dalam mengurus hal-hal yang berkaitan dengan lembaga. Oleh sebab itu, untuk periode 2005 – 2007, para PM akan bertanggungjawab penuh mulai dari urusan mengusahakan pendanaan bagi programnya, mengimplementasikan program, monitoring dan pelaporan.

Tindak lanjut keputusan rapat anggota tersebut, maka pada awal bulan Januari 2005 telah dilakukan proses rekrutmen untuk pengurus program baru. Para pengurus program baru yang telah berhasil direkrut sebagai berikut: Sdr. Aniceto Guru Berteni das Neves dan Sdri. Natercia Barboja de Deus sebagai PM dan Assisten untuk Program Penegakan Hukum, Sdr. Rosentino Amado Hei dan Edio Saldanha Borges sebagai PM dan Assisten Pro-

### **Ireland Aid mendanai Program Promosi HAM bagi Polisi**

Salah satu proyek dari Program Penegakan Hukum adalah Promosi HAM bagi Polisi Nasional Timor Leste (PNTL). Proyek ini telah berlangsung beberapa tahun yang lalu. Dan untuk tahun 2004, proyek ini didanai oleh Ireland Aid. Dan tahun inipun Ireland Aid juga telah menandatangani kontrak dengan HAK pada bulan April lalu untuk melanjutkan pendanaan proyek yang sama. Proyek yang terdiri dari kegiatan peman-tauan bagi pelayanan hukum dari polisi, pelatihan HAM bagi polisi di 13 distrik dan kegiatan pendidikan publik tentang tugas Polisi dan HAM.

### **Pendanaan Proyek Kecil**

Walau sulit mendapatkan lembaga dana untuk membiayai operasional program penegakan keadilan, namun untuk kegiatan atau proyek kecil masih ada lembaga bersedia mendanai. CAFOD adalah lembaga sosial gereja di Inggris telah mendanai perjalanan seorang staf HAK untuk melakukan lobby dan kampanye tentang keadilan ke Indonesia, Belanda (parlemen) dan pada sidang tahunan HAM di Genewa bulan Mei lalu. Selain itu, CAFOD juga telah ditandatangani kontrak pendanaan dengan HAK mengenai membiayai penerbitan dua buku untuk kampanye isu pengadilan internasional.

Kegiatan kecil lain yang mendapat dana tersendiri adalah Pertemuan Reguler Jaringan Nelayan se-Timor Leste pada 6 Mei, di Behau – Manatuto. Kegiatan ini didanai langsung oleh Conference Bishop Catholic of Jepang, dengan total dana U\$ 750.

### **Tantangan pendanaan bagi program baru**

Situasi berubah, dan tantangan pun berubah. Itulah kondisi yang dihadapi dalam urusan pembiayaan program HAK untuk tahun 2005. Setelah mempersiapkan program dan kepengurusan baru, maka mulai bulan Februari hingga Juni para Program Manager (PM) beserta Assistenya sambil membenahi sistem kerja di masing-masing divisi, mereka sibuk mengurus proposal dan lobby ke lembaga donor yang ada di Timor Leste.

Namun sayang, upaya serius dari para PM ini ternyata hanya menuai kesia-siaan tenaga saja. Proposal ke Kedutaan Finlandia untuk Program Penegakan Hukum ditolak dengan alasan yang tidak jelas. Kata Program Officer-nya bahwa Finlandia tidak lagi menaruh perhatian pada isu keadilan dan hak asasi manusia, namun di sisi lain mereka memberikan dana bagi JSMP. Begitupun dengan proposal ke AusAID untuk program yang sama, juga hingga sekarang belum mendapat tanggapan apapun.

Hal yang sama juga terjadi dengan proposal kegiatan advokasi hak atas kesehatan yang diajukan ke Kedutaan Inggris, proposal program penguatan institusi yang diajukan ke UNDP, dan proposal program advokasi hak petani yang diajukan ke Forum Asia. Diantara semua program, paling sulit untuk mendapat sumber pendanaan adalah untuk program penegakan keadilan.

Keadaan ini mengakibatkan lembaga kekurangan dana, hingga harus menutup kantor untuk pelayanan hukum bagi masyarakat pada bulan April dan Mei. Dan beberapa PM yang tetap kerja untuk mencari dana program pada bulan tersebut tidak menerima gaji, tetapi hanya bantuan uang seadanya guna mempertahankan hidup mereka.

### **Koalisi Solidaritas Jepang untuk Timor Leste mendanai penelitian Jungun lanfu**

Salah satu proyek dari Program Penegakan Keadilan adalah Penelitian Kasus Pelanggaran HAM yang terjadi pada masa penjajahan lalu. Untuk tahun ini East Timor Jepang Coalition telah menyepakati untuk mendanai sebagian besar biaya penelitian kasus Jungun lanfu (perbudakan seksual oleh tentara Jepang pada saat Perang Dunia II) di Timor Leste. Mereka telah mentransfer dana operasional 3 bulan sebesar U\$ 10.000, dan berjanji untuk melakukan

kampanye guna mengumpulkan dana lagi bagi penelitian ini.

Proyek yang akan berjalan kurang lebih 15 bulan ini akan dikerjakan staf HAK, beberapa tenaga pengumpul data lapangan dan seorang tenaga peneliti dari Indonesia. Program ini dimulai bulan Mei, dengan diawali lokakarya penelitian kasus Jungun lanfu, yang difasilitasi oleh dua orang aktivis solidaritas dari Jepang yaitu Akihisa Matsuno dan Kiyoko Furusawa.



*Rapat tengah tahunan anggota perkumpulan HAK*

## Mengatasi krisis tanggungjawab anggota Perkumpulan HAK.

Semenjak HAK merubah bentuk organisasinya dari yayasan ke perkumpulan, maka seharusnya penopang organisasinya berada di anggota. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa semangat dan kesadaran anggota tidak secepat perubahan bentuk organisasi.

Rendahnya tanggung jawab anggota ini, dapat membuat organisasi macet. Karena selama ini rapat-rapat anggota sering sulit untuk penuh quorum, dan kewajiban membayar iuran anggota dan kontribusi untuk membeli tanah hanya sebagian anggota saja yang penuh. Begitupun partisipasi anggota untuk mengatasi persoalan organisasi hanya segelintir orang saja.

Oleh sebab itu, sesuai "mandat" Rapat Anggota Tahunan Desember lalu, maka Direktur HAK telah menugaskan 2 staf (Manuel Monteiro dan Antonio Soares) untuk melakukan konsultasi dengan semua anggota berkaitan dengan hal tersebut di atas. Konsultasi yang berlangsung selama pada bulan Februari lalu terungkap bahwa selain faktor kurangnya cekatan dari staf yang melayani anggota, juga karena faktor mentalitas "lama" yang masih kuat diantara para anggota.



Para anggota masih kurang memahami dengan baik kiprah HAK karena informasi diterima terlalu "kaku", begitupun sebaliknya para anggota masih banyak yang menunggu apa yang bisa disumbangkan oleh organisasi bagi kepentingannya, dan bukannya menyumbangkan sesuatu bagi kepentingan bersama.

Jadi, hasil konsultasi ini mengindikasikan bahwa perlu proses usaha keras dari semua pihak untuk mentransformasi paradigma lama menjadi paradigma baru yang sesuai semangat demokrasi sebagaimana tercermin pada bentuk organisasi.

## Intensifkan Fundraising guna mengatasi kekurangan pendanaan program HAK

Ketergantungan besar pada dana dari lembaga donor, sering menyebabkan ketidakpastian pada implementasi rencana program. Untuk mengatasi masalah ini, maka mulai tahun ini telah diorganisir sebuah unit yang secara

penuh melakukan pekerjaan penggalang dana. Dana yang dikumpulkan akan dipakai sebagai salah satu sumber pendanaan program HAK.

Usaha-usaha dalam penggalang dana yang dilakukan adalah Penyediaan Jasa Konsultan NGO (fasilitator, pelatih, evaluator dll), Jasa Konsultan Hukum, fasilitasi pemasaran produk lokal, Jasa Konsultan Komputer, dan Jasa Penyewaan (kendaraan, fasilitas-fasilitas lain).

Unit penggalang dana atau Fundraising ini dikelola oleh seorang Manager dengan sistem manajemen profit. Dan Managernya adalah Mariano Ferreira. Bila ada yang membutuhkan jasa-jasa tersebut, silakan menghubunginya melalui telepon 723 7176.



## Posisi Keuangan HAK (Jan. - Juni. 2005)

No	Item	Jumlah
<b>A.</b>	<b>Penerimaan</b>	
1.	Saldo Dana HIVOS tahun lalu	20.296,77
2.	CAFOD	6.960,00
3.	Ireland Aid	31.199,27
4.	OXFAM	7.515,00
5.	USAID	19.958,62
6.	CBCJ	659,50
7.	Solidaritas Jepang	9.980,00
8.	HAK (*)	37.762,35
	Total	<b>124.331,51</b>
<b>B.</b>	<b>Pengeluaran</b>	
1.	Program Penegakan Hukum	14.403,83
2.	Program Penegakan Keadilan	4.469,60
3.	Program Advokasi Hak Ekosobud	891,75
4.	Program Penguatan Institusi	77.608,53
	Total	97.373,71
<b>C.</b>	<b>Saldo (Penerimaan - pengeluaran)</b>	<b>26.957,80</b>

NB: (\*) HAK adalah dana yang dihimpung dari iuran anggota, kontribusi staf, dan fundraising. Hingga bulan Juni 2005 jumlah dana iuran US\$ 265,00 dari 11 orang anggota yang telah menyumbang dari total anggota 135 orang, dan kontribusi staf US\$ 100,00 serta dari fundraising dan lain-lain sebesar US\$ 37.394,35

### Profil Anggota



#### **Vasco da Gama “Criado”: Tiada Hari Tanpa Pelayanan Kepada Rakyat**

Vasco da Gama atau lebih umum dikenal dengan nama klandestinya yaitu Criado, mulai berhubungan dengan HAK sejak beliau menjadi salah satu klien HAK pada tahun 1997. Di tahun

itu, tentara Indonesia menangkapnya yang ke sekian kalinya pada saat dia masih sebagai mahasiswa Universitas Timor Timur, Fakultas Pertanian yang sedang memimpin sebuah organisasi pemuda klandestin yang bernama OPJLATIL (Organizasaun Popular Juventude Lorico Asuwain Timor Leste). Criado yang memiliki banyak tanda bekas penyiksaan pada tubuhnya akibat sering masuk-keluar tahanan militer, pada waktu itu terpaksa melakukan ujian skripsinya di dalam tahanan dengan bantuan pengacara dari HAK.

Pemuda yang lahir di Quelicai, 23 Agustus 1967, sejak awal pendudukan militer Indonesia di Timor Leste telah bergabung dengan gerakan “resistencia”, dimulai sebagai anggota OPS (Organizasaun Popular da Siguransa) pada tahun 1975, lalu anggota FAD (Forsa Auto da Defesa) pada tahun 1978-1979, hingga memimpin organisasi APP MAI

(Perhimpunan Persatuan Pemuda dan Mahasiswa Anti Integrasi).

Pada tahun 1992, atas perintah Komando da Luta, Nino Konis Santana, Vasco da Gama yang sebelumnya sempat memiliki sebutan klandestin Mauleki dan Loriko Rai Nain, mendirikan OPJLATIL guna menghimpun pemuda nasionalis putus sekolah dalam rangka memberikan kontribusi bagi perjuangan pembebasan tanah air. Anggotanya pada saat itu banyak yang masuk penjara, menjadi cacat dan ditembak seperti yang terjadi pada aksi penyerangan Markas Brimob – Bairo Pite Dili, tahun 1997.

Suami dari Agustinha Gama da Silva dan bapak dari 3 orang anak, yang memiliki loyalitas tinggi pada atasannya, sekarang-pun masih sibuk melayani “komandannya” dengan memimpin CAQR (Comissao dos Asuntus dos Quadros da Resistencia) dalam mendata dan mengurus penghargaan bagi bekas pengurus pejuang klandestin. “Tiada hari tanpa pelayanan kepada rakyat”, itulah semboyan yang membuat motivasi Criado tetap aktif menyumbangkan tenaga dan pikirannya bagi negara ini. Namun, sebagai manusia diapun menghendaki suatu saat dia harus beristirahat dan menikmati kemerdekaan ini. Tetapi dia baru bisa istirahat dan menikmati hidup ini, bila tanggungjawab terhadap bekas anak buahnya telah dipenuhinya.